BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

TGX

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 – 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan bentuk komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan bekerja dengan lebih baik lagi serta mengembangkan inovasi sehingga di masa mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek sehingga mampu mencapai tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Trenggalek, 25 Februari 2026

Plt. KepalaDinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Trenggalek

ANJANG PURWOKO, ST.M.Ars
Penata Tingkat 1
NIP. 19800926 200501 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Pada Tahun 2025 Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 20 (dua puluh) dan 20 (dua puluh) target kinerja yang harus dicapai.

Pengukuran terhadap realisasi 20 (dua puluh) target kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 9 target;
2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 9 target;

Realisasi Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebesar Rp. Rp. 98.234.201.778,47 atau sebesar 93,82% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 104.706.603.395,00 Capaian Kinerja yang baik ini diharapkan dapat semakin meningkat dan dipertahankan dari tahun ke tahun.

Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap PD/instansi wajib mengiintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, terdapat dua (2) kegiatan dalam mendukung Pengarusutamaan Gender yaitu 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dan 2. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF …… iii

DAFTAR ISI ……..... iv

DAFTAR TABEL …… v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang …….…..... 1

1.2 Gambaran Umum …… 1

1.3 Isu-isu Strategis ……... 13

1.4 Landasan Hukum …… 14

1.5 Sistematika Penulisan …… 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

II.1 Perencanaan Strategis…… 17

II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 …… 36

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 …….. 43

II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 ……. 46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 52

III.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 …….. 52

III.2 Analisis Capaian Kinerja …… 58

III.3 Capaian Kinerja Lainnya ……. 107

III.4 Realisasi Anggaran..... 112

BAB IV 122

PENUTUP …… 122

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil ……..……... 2

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK……....…… 3

Tabel 1.3 Barang yang Dikelola ……...……... 3

Tabel 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis ……... 13

Tabel 2.1 Matriks Perencenaan Kinerja …… 17

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama ……. 36

Tabel 2.3 Perbandingan Perjanijan Kinerja ……... 44

Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran ……... 47

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis……. 52

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja …… 58

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain..... 99

Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan..... 100

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran …….. 112

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran …….. 115

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran …….. 118

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta upaya mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Penyusunan laporan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, Dinas PUPR bertanggung jawab atas pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, serta pengelolaan tata ruang wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas berpedoman pada dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Selain itu, laporan ini juga diharapkan menjadi alat akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 2025, Dinas PUPR menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan program prioritas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta pengelolaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Melalui laporan ini, Dinas PUPR berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang transparan mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang direncanakan.

I.2. Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan pada Salinan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 5, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2021, Tentang Penjabaran Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan sumber daya manusia SDM) sejumlah 239 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 81 orang dan PPPK sebanyak 158 orang dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 81 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
Menurut Golongan			
1	Golongan I	-	Orang
2	Golongan II	29	Orang
3	Golongan III	46	Orang
4	Golongan IV	6	Orang
	Jumlah Total	81	Orang
Menurut Pendidikan			
1	Pasca Sarjana	7	Orang
2	Sarjana	28	Orang
3	Diploma (D-III)	11	Orang
4	Diploma (D-IV)	6	Orang

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
5	SLTA/SMA/SMK	23	Orang
6	SLTP/SMP	6	Orang
7	SD	-	Orang
	Jumlah Total	81	Orang
Menurut Jenis Kelamin			
1	Laki - Laki	64	Orang
2	Perempuan	17	Orang
	Jumlah Total	81	Orang

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, Desember 2025

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK Dinas PUPR Kab. Trenggalek Tahun 2025

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	81	64	17
2	PPPK	158	139	19

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, Desember 2025

2. Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola Dinas PUPR Kab. Trenggalek Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Alat Besar	26
2	Alat Angkutan	108
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	23
4.	Alat Pertanian	2
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	889
6.	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	85
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
8.	Alat Laboratorium	99
9.	Alat Persenjataan	3
10.	Komputer	276
11.	Alat Produksi, Pengelolaan dan Permurnian	1
12.	Bangunan Gedung	70
13.	Jalan dan Jembatan	1996
14.	Bangunan Air	1883
15.	Instalasi	17
16.	Jaringan	15
	Jumlah Total	5497

Sumber : Laporan Mutasi Pengelola Barang Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek , Desember 2025

I.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

A. Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2021, Tentang Penjabaran Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang., Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud memiliki tugas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :

- **Perumusan kebijakan teknis** di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- **Pelaksanaan kebijakan** di bidang pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan penataan ruang.
- **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- **Pelaksanaan administrasi dinas** sesuai dengan lingkup tugasnya.
- **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi
- Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum
- Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan
- Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman
- Bidang Pertanahan
- UPTD Laboratorium

Adapun uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan infrastruktur dan penataan ruang wilayah. Secara umum, berikut adalah tugas dan fungsi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek:

a) Menyusun rencana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan sistem penyediaan air minum serta fasilitas umum lainnya;

b) Melaksanakan penataan ruang wilayah agar sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan, kawasan industri, kawasan pertanian, maupun kawasan lainnya;

c) Mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan pembangunan infrastruktur, seperti pengelolaan air, tanah, dan lingkungan hidup;

d) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada agar tetap layak pakai dan aman bagi masyarakat.

e) Menyusun dan merencanakan kebijakan serta program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah Kabupaten Trenggalek;

f) Menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan instansi terkait dalam hal pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, untuk memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap peraturan.

Melalui tugas dan fungsi ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan yang terencana dan terkelola dengan baik, serta menjamin kelayakan dan keberlanjutan infrastruktur serta penataan ruang yang ada di daerah tersebut.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administratif dan teknis operasional kepada seluruh unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, seperti :

- Membantu dalam penyusunan kebijakan dan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Membantu perencanaan kegiatan dinas serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan program-program yang ada;
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Yang membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mengelola urusan kepegawaian, seperti pengangkatan, pemindahan, dan pengembangan karir pegawai;
- Mengatur seluruh kegiatan administratif yang mendukung operasional Dinas PUPR dan menangani administrasi umum seperti surat-menyurat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- Mengelola data kepegawaian, absensi, dan pengajuan terkait tugas serta kedisiplinan pegawai;
- Membuat laporan mengenai kepegawaian dan administrasi umum untuk keperluan evaluasi dan pelaporan.

Tugas dan Fungsi Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

- Menyusun, mengelola, dan mengawasi anggaran serta laporan keuangan Dinas PUPR untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan sesuai peraturan;
- Menyusun rencana kegiatan dan program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, serta merencanakan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan;
- Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk keperluan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- Mengelola segala hal yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan di lingkungan Dinas PUPR, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- Menyusun laporan-laporan keuangan dan pelaksanaan program secara rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di Dinas PUPR.

3. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, serta dalam pengelolaan sektor jasa konstruksi. Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik, sesuai standar, serta mendukung kemajuan ekonomi dan sosial di Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari :

a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
c. Seksi Bina Jasa Konstruksi

Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi

- Melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya di Kabupaten Trenggalek;
- Mengelola dan mengawasi penyediaan jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pengadaan kontraktor dan pengawasan pelaksanaan proyek;
- Menyusun rencana dan program terkait pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya, serta merencanakan anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Melakukan pembinaan dan memberikan informasi terkait dengan kebijakan dan peraturan jasa konstruksi kepada masyarakat dan penyedia jasa konstruksi;
- Menyusun rencana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta memastikan kelancaran transportasi di wilayah Kabupaten Trenggalek.

4. Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum

Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2021.

Yang membawahi :

a) Seksi Konservasi Sumberdaya Air dan Pengembangan Irigasi
b) Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat
c) Seksi Penyediaan Air Minum

Tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum

- Mengelola sumber daya air di Kabupaten Trenggalek, termasuk pemanfaatan, pengendalian, dan konservasi air untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air, seperti irigasi, bendungan, saluran air, dan sistem drainase;
- Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem penyediaan air minum yang berkualitas untuk masyarakat, termasuk pengelolaan sumber air bersih dan jaringan distribusinya;
- Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur terkait sumber daya air dan penyediaan air minum yang berkelanjutan.

Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan penyediaan air bersih serta pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Trenggalek, yang penting untuk kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

5. Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan

Yang membawahi :

a) Seksi Perencanaan Tata Ruang
b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang
c) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Tugas dan Fungsi Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan

Secara umum, bidang ini bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang ini menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

a. menyusun program kerja Bidang penataan ruang dan tata bangunan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penataan ruang dan tata bangunan;
c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang penataan ruang dan tata bangunan;
d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang penataan ruang dan tata bangunan;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penataan ruang dan tata bangunan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman

Bidang ini bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, serta pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang ini menyelenggarakan tugas dan fungsi berikut :

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, serta pengembangan kawasan permukiman.
- Penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, drainase, persampahan, serta pengembangan permukiman.
- Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, drainase, persampahan, serta pengembangan permukiman.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang air minum, air limbah domestik, drainase, persampahan, serta pengembangan permukiman.
- Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan kepada masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan air minum, air limbah domestik, drainase, persampahan, serta pengembangan permukiman.
- Penyusunan dan penetapan standar, norma, prosedur, dan kriteria di bidang

pengelolaan air minum, air limbah domestik, drainase, persampahan, serta pengembangan permukiman.

7. Bidang Pertanahan

Dengan tugas dan fungsi yang meliputi pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan tanah, Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berperan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil dalam pengelolaan sumber daya tanah.

Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penatagunaan, pemanfaatan tanah, inventarisasi, penguasaan tanah, pengembangan wilayah, permasalahan pertanahan, pengawasan, dan pengendalian;
- Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan program penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis terkait penatagunaan, pemanfaatan tanah, inventarisasi, penguasaan tanah, pengembangan wilayah, permasalahan pertanahan, pengawasan, dan pengendalian.

8. UPTD Laboratorium

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) laboratorium pada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program yang terkait dengan infrastruktur, pembangunan, dan perencanaan pembangunan di sektor PUPR.

Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium

- UPTD laboratorium bertanggung jawab untuk melakukan pengujian terhadap material dan bahan konstruksi yang digunakan dalam proyek pembangunan. Misalnya, pengujian kualitas beton, aspal, agregat, dan material lainnya.
- Melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas dan spesifikasi material yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan, dan bangunan lainnya.
- Memberikan layanan pengujian kepada instansi terkait, kontraktor, maupun masyarakat yang membutuhkan hasil pengujian material sesuai standar.
- Menjaga dan memastikan bahwa semua pengujian yang dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

- Membuat laporan hasil pengujian yang dilakukan, dan mendokumentasikan semua kegiatan serta hasil uji yang diperoleh.
- Menyediakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi petugas atau pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan untuk memahami standar pengujian yang harus dilakukan.

Dengan peran dan fungsi ini, UPTD laboratorium pada Dinas PUPR menjadi bagian yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada di daerah. Gambar struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek disajikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati No.43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

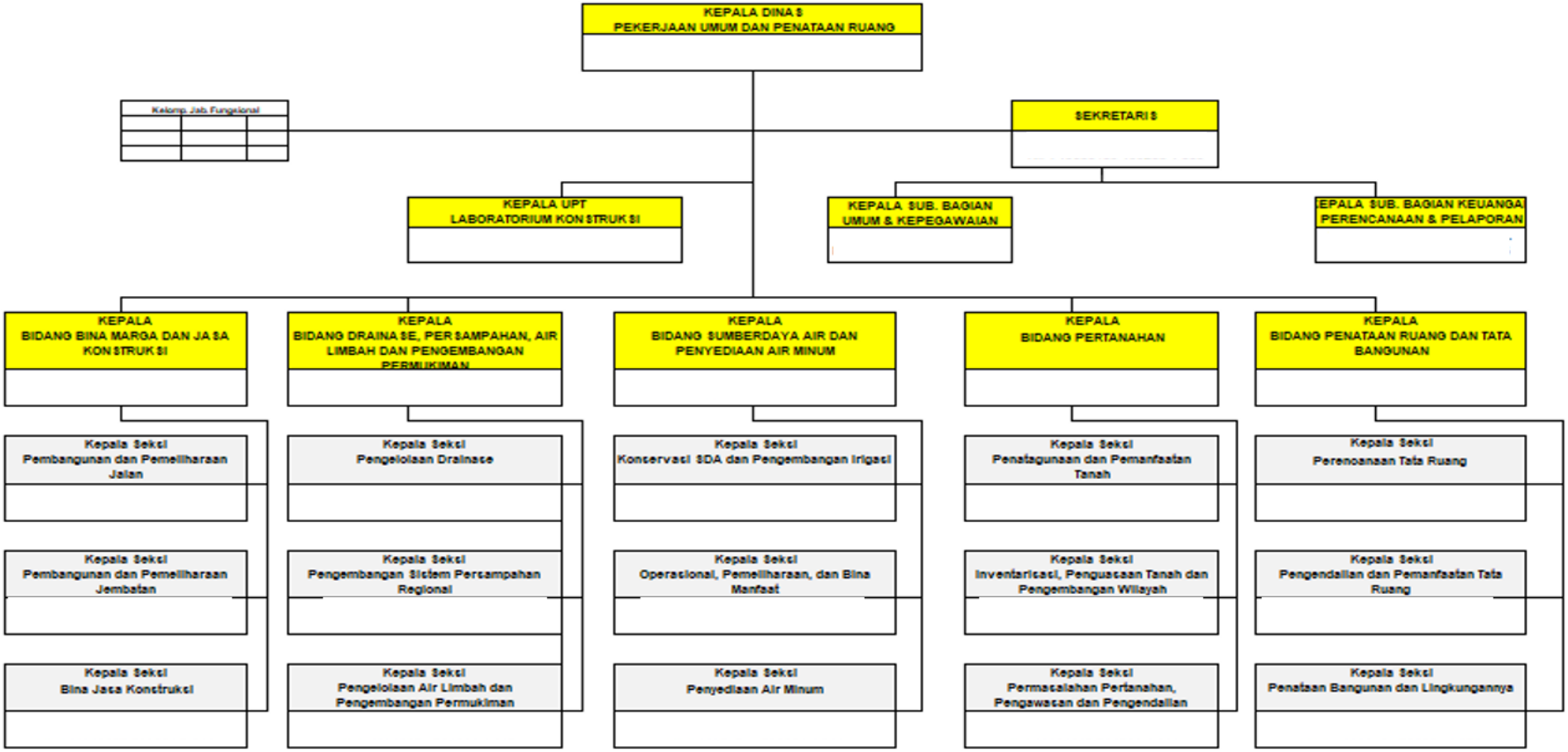

I.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dirumuskan 10 isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

a. Kualitas layanan jalan dan jembatan Kabupaten belum optimal;
b. Kurangnya Konektifitas layanan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan dan perdesaan serta kawasan strategis;
c. Kurang sesuainya geometri jalan dengan standar;
d. Proses penyusunan dokumen Tata Ruang yang memerlukan waktu yang relatif lama;
e. Belum adanya adanya aturan turunan terkait dengan persetujuan bangunan gedung (PBG);
f. Belum tersedianya data base irigasi yang lengkap dan akurat;
g. Rendahnya kualitas dan kuantitras jaringan irigasi;
h. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi;
i. Percepatan Penyelesaian Penyediaan tanah bagi PNS, PSD dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian, Permasalahan Tanah pada kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan dalam rangka Percepatan akselerasi peningkatan perekonomian yng inklusif melalui pengembangan pariwisata kolaboratif yang didukung oleh penyediaan infrastruktur;
j. Tertanya Pemanfaatan, Penggunaan dan Penguasaan Tanah baik pada Kawasan Hutan maupun Non Kehutanan melalui penyesuaian peruntukan, pemanfaatan dan penatagunaan tanahnya sebagai bagian.

Tabel 1.4
Tabel permasalahan dan isu strategis

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	Jumlah kendaraan yang cenderung meningkat setiap tahun, kondisi muatan kendaraan melebihi standar muatan, Kurangnya sarana dan prasarana pelengkap jalan,	1.	Kurangnya Kualitas layanan jalan dan jembatan Kabupaten yang belum optimal
2.	masih belum terlaksananya secara optimal pembinaan terhadap pelaksana jasa konstruksi dan masih belum terkelolanya sistem informasi jasa konstruks.	2.	Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi;
3.	masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan saluran irigasi	3.	Rendahnya kualitas dan kuantitras jaringan irigasi

Permasalahan		Isu Strategis	
	kondisi tanah		
4.	Kurangnya sarana prasarana air minum yang memada	4.	regulasi pemanfaatan air minum terutama untuk sistem perdesaan terkait pembagian antara kebutuhan air minum dan pertanian
5.	Belum dilaksanakannya sosialisasi penyelenggaraan bangunan gedung terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB	5.	Belum adanya adanya aturan turunan terkait dengan persetujuan bangunan gedung (PBG)
6.	Beberapa bagian kota Trenggalek mungkin masih memiliki sistem drainase yang kurang memadai, baik dari sisi kapasitas maupun distribusi, Kurangnya Pemeliharaan Rutin	6.	masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran-saluran drainase jalan sehingga sering terjadinya penyumbatan pada saluran drainase yang mengakibatkan meluapnya air ke permukaan pada saat musim hujan
7.	Perlunya Penyuluhan tentang pentingnya memilah sampah, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta penerapan teknologi untuk mendaur ulang sampah bisa menjadi solusi yang perlu digalakkan.	7.	Belum optimalnya penerapan Perda Kabupaten Trenggalek No. 6 tahun 2021 tentang persampahan
8.	Belum terbangunnya IPLT dan IPAL sebagai sarana pengolah limbah	8.	Belum optimalnya pengelolaan limbah
9.	Pengembangan permukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat penting, termasuk penerapan konsep green building dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.	9.	konversi lahan pertanian menjadi permukiman, kerusakan hutan, serta pengelolaan sampah dan limbah harus diatasi dengan serius.
10.	Adanya potensi permasalahan atau dampak dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;	10.	Percepatan Penyelesaian Penyediaan tanah bagi PNS, PSD dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian, Permasalahan Tanah pada kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan dalam rangka Percepatan akselerasi peningkatan perekonomian yng inklusif melalui pengembangan pariwisata kolaboratif yang didukung oleh penyediaan infrastruktur

I.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Trenggalek No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten TrenggalekTahun 2021 Nomor 43)
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Pengarusutamaan Gender Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isi – isu startegis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kerja organisasi dan analisis atas caaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja yang diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)"

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek mendukung pada misi berikut :

- Misi kesatu, yaitu :

  Mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan kesehatan berbasis big data (Satu Data Besar)
- Misi Kedua, yaitu :

  Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja
Dinas PUPR Kab. Trenggalek Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81,00%
Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Nilai (kategori nilai) SAKIP 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00%(A) 92,00%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi 2. Persentase nilai aset dalam kondisi baik 3. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 % 100,00 % 100,00 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13,00 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100,00 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 Orang/bulan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,00 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100,00 %
Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100,00 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00 Paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Kelengkapannya		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,00 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100,00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100,00 %
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100,00 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Prosentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik dan Prosentase Bangunan Perkuatan Tebing Dalam Kondisi baik	65,00%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Sasaran : Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	1. Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 2. Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir 3. Persentase Dokumen Perencanaan Sumber Daya Air yang disusun	58,13% 35,84% 100,00 %
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 2. Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	58,13 % 35,84%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan/ Perkuatan Tebing dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	35,84%
Pembinaan dan PemberdayaanKelembagaan Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	30 Lembaga
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5 KM
Pembangunan Bangunan PerkuatanTebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,47 KM
Rehabilitasi Bangunan PerkuatanTebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,66 KM
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padaDaerah	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	58.13 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota		
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.387 KM
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 Bendung
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,6 KM
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	100%
Sasaran : Pemenuhan Pelayanan Air Minum	1. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum 2. Persentase Ds Pengelola SPAM dengan Baik	100,00 % 100,00 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	100 %
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	100,00 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	15 Orang
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7,00 SR
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100,00 %
Sasaran : Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak	67,98%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100,00 %
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar Menjadi Layak	67,98%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	30 Rumah Tangga
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	525 Rumah Tangga
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	58,00 %
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	60 %
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	8 Ton/hari
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	2 Unit
Penyediaan Sarana PendukungTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	5 Unit
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	81,9%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Drainase yang Terbangun	100 %
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4000 M
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Meter
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Penyelenggaraan bangunan gedung yang berkelanjutan	68,00%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Sasaran : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	1. Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses 2. Regulasi bangunan gedung yang disusun 3. Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	100% 100% 4,91%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	80,50 %
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik FungsiBangunan Gedung	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	81,00 %
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	560 Orang
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 dokumenDokumen
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Dokumen perencanaan berkelanjutan	93,00%
Sasaran : Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	100%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun	86,00 %
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di	Persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan yang disusun	86,00 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Daerah Kabupaten/Kota		
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen
Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,Kawasan Pariwisata, KawasanSistem Perkotaan Nasional danKawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	2 Dokumen
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Sasaran : Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungannya yang disusun	80,00 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen RRTR yang disusun	87,50%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang disusun	1 dokumen
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR	1 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah informasi tata ruang yang dikeluarkan 2. Jumlah rekomendasi Tata Ruang yang diterbitkan dan Jumlah informasi tata ruang yang dikeluarkan	36 Informasi 50 BA
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	50 Layanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen
Sasaran : Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	100 %
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria	3 Lokasi
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah	100,00 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang ditetapkan	
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1. Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec) 2. Jumlah Lokasi Pemetaan Lokasi Zona Nilai Tanah 3. Jumlah Lokasi pendataan Penggunaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan serta kepentingan lainnya	1. 2 Lokasi 2. 4 Lokasi 3. 4 Lokasi
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	100,00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	1. Jumlah lokasi Pendataan Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle Hak 2.Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	3 Kecamatan 5 Desa/ Kelurahan
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah permasalahan tanah kosong yang diselesaikan	100,00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100,00 %
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan
Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	1. Persentase Pengurusuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk PSN dan PSD 2. Jumlah lokasi pendataan Tanah Negara Bebas Untuk Pengendalian Pemanfaatnnya	100,00 % 3 Kecamatan
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin / persetujuan Penggunaan, penguasaan, pemanfaatan dan	2 ijin/ persetujuan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
	penatagunaan tanah negara pada kawasan hutan maupun non kehutanan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	2 Dokumen
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1. Persentase Kegiatan Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pembangunan 2. Persentase Penyelesaian Permasalahan Sengketan Tanah Garapan pada Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan	100 % 20 %
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100,00 %
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantab serta Jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	78 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Sasaran : Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang) 2. Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik 3. Persentase dokumen Perencanan jalan dan Jembatan yang disusun 4. Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung	81 % 100 % 100 % 30 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase kemantapan Jalan kabupaten 2. Persentase jembatan berfungsi baik	81 % 100 %
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100,00 %
Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 Dokumen
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13 KM
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8 KM
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0.5 KM
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan
Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	859,96 KM
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,2 KM

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100 %
Sasaran : Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	100 %
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100 %
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 kali
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	45 Orang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	1 Dokumen
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib PemanfaatanJasa Konstruksi	Jumlah Pelaksanaan Bimtek tertib Usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi	1 kali
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi, Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Persentase Pengadaan Tanah dan Penataan Aset Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100 %
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	1.Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya 2.Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya 3.Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya	100 % 100 % 100 %
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1. Luas Tanah yang terbebaskan untuk Pembangunan 2. Persentase fasilitasi Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah	1000 m2 100 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	1000 m2
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugiandan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 11 sasaran dan 22 indikator sasaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nili) SAKIP	-	Predikat Nilai SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	Inspektorat
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun n	Hasil Survei Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	%	Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun dibagi jumlah dokumen Rencana detail tata ruang yang seharusnya disusun dalam waktu 5 tahun X 100%	Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan
3	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	%	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun dibagi dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang seharusnya disusun dalam waktu 5 tahun dikali 100%	Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan
4	Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	%	Jumlah Dokumen Penata Gunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun dibagi Jumlah Dokumen Penata Gunaan Tanah dan Reforma Agraria yang direncanakan disusun dikali 100%	Bidang Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
5	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	- Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	%	- (Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap/ Panjang Keseluruhan Jalan Kab)x100 %	Bidang Bina Marga da Jasa Konstruksi
		Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik		- (Jumlah Jembatan yang Berfungsi Baik/ Jumlah Keseluruhan Jembatan)x 100%	Bidang Bina Marga da Jasa Konstruksi
		Persentase dokumen Perencanan jalan dan Jembatan yang disusun		- Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan dibagi jumlah dok Rencana Induk pengembangan Jaringan jalan yg seharusnya disusun	Bidang Bina Marga da Jasa Konstruksi
		Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung		- Panjang Jalan Yang Sudah Terhubung dibagi Panjang Jalan Yang Seharusnya Terhubung	Bidang Bina Marga da Jasa Konstruksi
6	Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengad	Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD	%	Persentase Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan	Bidang Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
	aan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	dan Pembangunan Infrastruktur lainnya		Infrastruktur lainnya dibagi keseluruhan Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya x 100%	
		Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya		Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya dibagi keseluruhan Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya x 100%	Bidang Pertanahan
		Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan		Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya dibagi keseluruhan	Bidang Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
		Pembangunan Infrastruktur Lainnya		Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya x 100%	
7	Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	%	(Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik/ Panjang Keseluruhan Jaringan Irigasi) x 100 %	Bidang SDA dan PAM
		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir		Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang dibangun atau diperbaiki dibagi Panjang keseluruhan tebing yang seharusnya ditangani x 100%	Bidang SDA dan PAM
		Persentase Dokumen Perencanaan Sumber Daya Air yang disusun		Jumlah dokumen rencana Induk Jaringan Irigasi yang disusun dibagi jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan Irigasi yg seharusnya disusun x 100%	Bidang SDA dan PAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
8	Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	%	(Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan + Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Non Perpipaan) / Jumlah Proyeksi Rumah Tangga di Kabupaten	Bidang SDA dan PAM
		Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik		Jumlah Desa yang Mengelola SPAM dengan Baik / Jumlah Desa yang Memiliki SPAM	Bidang SDA dan PAM
9	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF),	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	%	Jumlah rekomendasi Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses x 100%	Bidang Penataan Ruang dan Bangunan
		Regulasi bangunan gedung yang disusun		Jumlah Regulasi bangunan gedung yang disusun dibagi jumlah regulasi yang seharusnya disusun x 100%	Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
	Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau		Jumlah Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau dibagi jumlah keseluruhan jumlah gedung negara x 100%	Bidang Penataan Ruang dan Bangunan
10	Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	%	Jumlah Tenaga Terampil kontruksi dan jumlah dokumen data informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Yang disusun dibagi proyeksi Jumlah Tenaga Terampil kontruksi dan jumlah dokumen data informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang seharusnya disusun x 100%	Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
11	Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak	%	Jumlah Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar Menjadi Layak / Jumlah Proyeksi Rumah Tangga di Kabupaten	Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra menjadi acuan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya dengan mempertimbangkan capaian sasaran tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Terdapat beberapa target sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berbeda dengan target sasaran kinerja pada Renstra, hal tersebut dikarenakan adanya kendala kendala sehingga diprediksi target yang tertuang dalam sasaran jangka menengah tidak mungkin dapat dicapai.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 2 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 2 (dua) bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

2. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Penambahan anggaran Rutin Jalan dan Jembatan.

Tabel 2. 3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Nilai (kategori nilai) SAKIP	88,00 (A)%	88,00 (A)%
		.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,50	91,50
2	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	2	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	3	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	80,00%	20,00%
4	Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	4	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	100%	100%
5	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	5	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	81,00%	70,00%
			Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	100%	97,89%
			Prosentase akses antar kecamatan yg terhubung	30,00%	30,00%
6	Meningkatnya kualitas layanan penanganan	6	Presentase Luas Tanah yang	100,00%	100,00%

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
	permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD		dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya		
			Presentase Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100,00%	100,00%
			Presentase Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya	100,00%	100,00%
7	Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	7	Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	58,13%	58,13%
			Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	35,84%	35,84%
8	Pemenuhan Pelayanan Air Minum	8	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	88,68%	100%
			Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	100,00%	100,00%
9	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung	9	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	100%	100,00%

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
	(PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau		Regulasi bangunan gedung yang disusun	100,00%	100,00%
			Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	100%	4,91%
10	Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	10	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	100,00%	100,00%
11	Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	11	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak	67,48%	67,48%

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**16.276.953.057,55**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.391,40	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.280.750.249,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.252.863,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.734.459,40	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.380.907,55	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.724.089,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.777.585.472,20	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.525.626,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**6.745.291.244,00**	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.741.493.242,00	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.003.798.002,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	**2.717.313.515,15**	

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
PENYEDIAAN AIR MINUM		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.717.313.515,15	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**2.768.411.272,00**	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.768.411.272,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**7.568.764.912,00**	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.568.764.912,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**3.231.427.836,00**	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.231.427.836,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**4.033.572.855,40**	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.033.572.855,40	✓
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**104.622.775,00**	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	104.622.775,00	

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**57.965.671.513,00**	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	57.965.671.513,00	✓
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**250.000.000,00**	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	150.000.000,00	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	80.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**755.657.802,90**	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	542.627.961,90	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.526.295,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	62.503.546,00	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**186.769.353,00**	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	186.769.353,00	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**662.703.899,00**	

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	662.703.899,00	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**308.003.640,00**	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	308.003.640,00	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**326.125.730,00**	
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	143.059.730,00	
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	183.066.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**763.888.990,00**	
Penerbitan Izin Membuka Tanah	763.888.990,00	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**41.425.000,00**	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	41.425.000,00	
JUMLAH	**104.706.603.395,00**	

Program Penataan Bangunan Gedung pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan anggaran Rp. 4.033.572.855,40 dengan tujuan Kesesuaian bangunan Gedung dengan fungsi, kegunaan, standar kualitas bangunan gedung serta bangunan gedung yang responsif gender.

Program Penyelenggaraan Jalan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 57.965.671.513,00 telah mendukung/ responsif gender dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan jalan dan jembatan dapat diakses secara setara oleh perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan seperti anak, lansia dan penyandang disabilitas.

Melalui tagging PPRG tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan Jalan, Jembatan dan Gedung Negara tidak hanya efektif dan tepat sasaran, tetapi juga berkeadilan dan inklusif. Integrasi perspektif gender ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendukung pencapaian nilai SAKIP .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1. Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan kinerja tahun ke - 5 pada periode Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 98,24 % yang dihitung dari rata-rata capaian sasaran strategis yang diperjanjikan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan %				Realisasi Tahun 2025	Capaian %
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP	A (88,00) %	-	-	A (86,24) %		A (86,24) %	98,00%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,50 %	-	-	-	98,97 %	98,97 %	108,16%
2	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	100,00 %	-	-	-	62,50 %	62,50%	62,50 %
3	Meningkatnya jumlah dokumen perencan	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan	20,00 %	-	-	-	10,00 %	10,00 %	50,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan %				Realisasi Tahun 2025	Capaian %
				I	II	III	IV		
	aan kota hijau yang disusun	dan Lingkungan yang disusun							
4	Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	100,00 %	-	-	-	69,96 %	69,96 %	69,96 %
5	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	70,00 %	-	-	-	66,89 %	66,89 %	95,56%
		Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	97,89 %	-	-	-	99,46 %	99,46 %	101,60 %
		Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung	30,00 %	-	-	-	30,14 %	30,14 %	100,47 %
6	Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian	Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100,00 %	-	-	-	81,82 %	81,82 %	81,82 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan %				Realisasi Tahun 2025	Capaian %
				I	II	III	IV		
	Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100,00 %	-	-	-	116,67 %	116,67 %	116,67 %
		Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya,	100,00 %	-	-	-	116,67 %	116,67 %	116,67%
7	Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	58,13 %	-	-	-	58,32 %	58,32 %	100,32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan %				Realisasi Tahun 2025	Capaian %
				I	II	III	IV		
	dalam kondisi baik	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	35,84 %	-	-	-	35,91 %	35,91 %	100,22%
8	Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	100,00 %	-	-	-	89,80 %	89,80 %	89,80 %
		Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00%
9	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF),	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	100,00 %	-	-	-	98,77 %	98,77 %	98,77 %
		Regulasi bangunan gedung yang disusun	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan %				Realisasi Tahun 2025	Capaian %
				I	II	III	IV		
	Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	4,91 %	-	-	-	4,56 %	4,56 %	92,86 %
10	Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	100,00 %	-	-	-	156,00 %	156,00 %	155,69%
11	Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak	67,48 %	-	-	-	85,00 %	85,00 %	125,74%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 9 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 9 target;

Dari data tersebut, diketahui bahwa rata – rata capaian indikator utama Dinas PUPR Tahun 2025 adalah sebesar 98,24%.

Secara umum, kami dapat menyampaikan bahwa trerdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

Faktor pendorong :

1. Adanya Penjenjangan kinerja yang jelas dan terstruktur;
2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan ilmu pengetahuan;
3. Kemajuan informasi dan teknologi;
4. Dukungan dana
5. Peningkatan koordinasi yang intensif antar lembaga/instansi baik Pusat maupun provinsi

Faktor penghambat :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana;
2. Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai;
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia
4. Kurang maksimalnya koordinasi serta sinergi yang kuat antara pemerintah selaku regulator bersama dengan masyarakat, pelaku pembangunan yang membutuhkan ruang dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan efektivitas tata ruang baik dalam perencanaan,dan pemanfaatan ruang.

III.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2. Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nili) SAKIP	A (84,74)	A (85,0)	A (86,00)	85,60 (A)%	A (88,00)	A (90,00)	0	A (84,84)	A (85,41)	A (86.11)	A (86,24)	0	0	100%	99%	100,60%	98,00%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90	90,5	98,65	91,50 %	92,00 %	0	86,5	98,64	99,94	98,97	0	0	0,9611111	1,0899448	101,31%	108,16%
Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	31,25 %	50,00 %	0`	50,00 %	100,00%	100,00%	0	31,25 %	50,00 %	56,25 %	62,50 %	0	0,00 %	62,50%	0%	112,50%	62,50 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	0	20,00 %	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00%	0	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	0	0%	50,00%	25,00 %	25,00 %	50,00%
Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	11,12 %	32,21 %	54,87 %	77,48 %	100,00%	100,00%	0	40,75 %	57,50 %	64,42 %	69,96 %	0	0%	127%	105%	83,14 %	69,96%
Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	73%	78%	79%	80,00 %	70,00 %	70,00 %	73%	73,03 %	76,51 %	72,87 %	66,89 %	0	100%	94%	97%	91,08 %	95,56%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	99,24	99,67 %	99,78 %	99,89 %	97,89 %	100,00%	99,24 %	99,24 %	99,35 %	99,57 %	99,46 %	0	1,00 %	99,56%	99,56 %	99,67 %	99,46%
	Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung	22%	22%	25%	25,00 %	30,00 %	33,00 %	0	22%	25%	27%	30,14 %	0	0%	100%	100%	109,30%	100,47%
Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan	Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	51%	78%	94%	94,00 %	100,00%	100,00%	0	79%	82%	82%	81,82 %	0	0%	101%	87%	87,04 %	81,82%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	0%	0%	33%	67,00%	100,00%	100,00%	0	0%	50%	117%	116,67%	0	0%	0%	150%	174,13%	116,67%
	Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya,	25%	50%	75%	100,00%	100,00%	100,00%	0	67%	83%	117%	116,67%	0	0%	133%	111%	116,67%	116,67%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	55%	55,73 %	56,46 %	57,29 %	58,13 %	58,97 %	55%	55,85 %	56,18 %	58%	58,32 %	0	99,95 %	100,21 %	99,51 %	101,21%	100,32%
	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	31%	32,12 %	33,25 %	34,54 %	35,84 %	37,13 %	31%	31,00 %	32,19 %	33%	35,91 %	0	100,00%	96,51%	96,82 %	96,78 %	100,22%
Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	87,83 %	90,87 %	93,91 %	88,68 %	100,00%	100,00%	0	87,36 %	88,61 %	90%	89,80 %	0	0%	96%	94%	100,97%	89,80%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
	Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	96,84 %	97,89 %	98,95 %	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	100%	100,00%	0	0%	102%	101%	100,00%	100,00%
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelen	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	8%	27%	49%	53,50 %	100,00%	100,00%	0	27%	53%	66%	98,77 %	0	0%	100%	108%	123,62%	98,77%
	Regulasi bangunan gedung yang disusun	0%	25%	50%	75,00 %	100,00%	100,00%	0	25%	50%	75%	100,00%	0	0%	100%	100%	100,00%	100,00%
	Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	0%	1,75 %	2,81 %	3,86 %	4,91%	5,96 %	0	1,05 %	3,16 %	4,21 %	4,56%	0	0%	60,00%	112,50%	109,09%	92,86%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
ggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau																		
Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	20%	40%	76%	80,00%	100%	100,00%	0	67%	106%	126%	156,00%	0	0%	168%	140%	157,35%	155,69%
Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan	65,41	65,92	66,43	83,10%	67,48%	67,98%	0	82,6%	83,05%	83,54%	85,00%	0	0	0,0125303	0,0125011	100,53%	125,74%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
	dari Dasar menjadi Layak																	

III.2.1.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3. 2.1.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nili) SAKIP	A (84,74)	A (85,00)	A (86,00)	A (85,60)	A (88,00)	A (90,00)	0	A (84,84)	A (85,41)	A (86.11)	A (86,24)	0	0	100%	99%	100,60%	98,00%

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian realisasi sasaran adalah :

(1) Penetapan indikator kinerja yang tepat dan pengukuran yang objektif akan memastikan pencapaian tujuan yang terencana;

(2) Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya;

(3) Sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dapat mendorong instansi untuk berkompetisi mencapai sasaran kinerja.

Kendala dalam pencapaian realisasi sasaran adalah :

(1) Belum adanya Sistem Perencanaan Penganggaran dan Manajemen Kinerja yang Terpadu;

(2) Kurangnya Pemahaman Pegawai terkait SAKIP;

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja ini yang akan dilakukan di tahun mendatang :

(1) Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja;

(2) Menjalin kerjasama dengan instansi lain untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

III.2.1.2 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3. 2.1.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90	90,5	98,65	91,5	91,50%	0	86,5	98,64	99,94	98,97		0	96.11	108.99	101,31	108,16%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

(2) Kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan sikap profesional petugas pelayanan.

(3) Prosedur pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan efisien akan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan.

Tantangan dalam pencapaian sasaran adalah :

(1) Kurangnya pelatihan atau keterampilan pada petugas pelayanan publik dapat menghambat kualitas layanan yang diberikan.

(2) Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat.

Upaya/Strategi yang akan dilakukan di Tahun Mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini:

(1) Mengembangkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas untuk mendukung kegiatan masyarakat.

(2) Lakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkala untuk memastikan kualitas dan keamanan.

(3) Mengembangkan sistem pengaduan yang efektif untuk memfasilitasi pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat.

III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)

Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	31,25%	50,00%	0`	50,00%	100,00%	100,00%	0	31,25%	50,00%	56,00%	62,50%		0,00%	62,50%	0%	112,50%	62,50%

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun adalah dokumen yang disusun kabupaten/kota dalam upaya untuk menyelenggarakan penataan ruang secara operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya sesuai prioritas pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan didukung keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan ruang secara adil dan seimbang**;**

(2) Penyediaan dan kecukupan sumberdana dan sumberdaya yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan tata ruang daerah;

(3) Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Instansi terkait di tingkat Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah:

(1) Terjadinya kesenjangan antara substansi rencana tata ruang terhadap implementasi dan pelaksanaan atas penggunaan ruang wilayah di lapangan**;**

(2) Perkembangan kebijakan sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan ruang wilayah yang sangat dinamis dan sangat fluid mengakibatkan perlu upaya percepatan dalam rangka penyusunan rencana tata ruang wilayah

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 **:**

(1) Melakukan upaya koordinasi yang lebih intensif dan secara maksimal antar lembaga/instansi baik Pusat maupun provinsi dalam

mewujudkan bahan substansi rencana tata ruang

(2) Terus berupaya melakukan sosialisasi dan diseminasi kebijakan penyelenggaraan ruang wilayah kepada masyarakat lebih terarah

III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.3. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	0	20,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	0	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		0%	50,00%	25,00%	25,00%	50,00%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Mempercepat proses penetapaan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Trenggalek;

(2) Kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (BAPPERIDA), Dinas Lingkungan Hidup, dan lembaga lainnya akan memperlancar proses penyusunan dan implementasi Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan

(3) Anggaran yang memadai akan memungkinkan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam waktu yang tepat.

(4) Evaluasi dan revisi berkala pada Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan akan menjaga agar rencana tersebut tetap relevan.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Resistensi atau penolakan dari masyarakat terhadap perubahan yang diusulkan dalam Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan, seperti pengalihan fungsi lahan atau pembatasan pembangunan, dapat menghambat implementasi perencanaan

(2) Kurangnya pengawasan atau evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan, tanpa adanya mekanisme pemantauan yang efektif, penerapan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan di lapangan bisa menyimpang dari rencana yang telah disusun.

(3) Data yang tidak akurat atau tidak lengkap mengenai kondisi lingkungan, topografi, penggunaan lahan, dan infrastruktur di Trenggalek akan mempersulit penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang tepat

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 :

1. Optimalisasi fungsi pengawasan atau evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan, tanpa adanya mekanisme pemantauan yang efektif, penerapan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan di lapangan melalui perijinan PBG dan SLF yang telah terbit.

III.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya dokumen penatagunaan tanah dan reforma agraria yang disusun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.4. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	11,12%	32,21%	54,87%	77,48%	100,00%	100,00%	0	40,75%	57,50%	64,42%	69,96%		0%	127%	105%	83,14%	69,96%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Data tanah yang akurat, lengkap, dan terintegrasi sangat penting dalam penyusunan dan implementasi dokumen ini;

(2) Koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta lembaga yang menangani masalah pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta lembaga perencanaan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa penatagunaan tanah dan reforma agraria dilaksanakan dengan baik;

(3) Dalam banyak kasus, sengketa tanah yang tidak terselesaikan atau kurangnya legalitas dapat menghambat proses reforma agraria. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah:

(1) Sengketa tanah antara individu, kelompok, atau antara masyarakat dan pihak lain sering menjadi hambatan besar dalam implementasi reforma agraria.

(2) Proses pengumpulan dan pemutakhiran data tanah di lapangan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar yang dapat menyebabkan ketertinggalan dalam proses perencanaan dan kebijakan reforma agraria

(3) Ketidakjelasan status hukum tanah dan masalah terkait sertifikasi tanah dapat menjadi penghalang besar.

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 **:**

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemneteroian kehutanan perihal penataan batas penyelesaian penguasaan tanah dalam rangaka penataan batas kawasan hutan (PPTPKH);
2. Kolaborasi dengan onstansi vertikal maupun horisontal pembentukan tim gugus tugas reforma agraria (GTRA);

III.2.5.1. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.5.1. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	73%	78%	79%	80,00%	70,00%	82,00%	73%	73,03%	76,51%	72,87%	66,89%		100%	94%	97%	91,08%	95,56%

dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik																		

Yang dimaksud jalan kabupaten dalam kondisi mantab adalah Jalan kabupaten yang dalam kondisi baik dan sedang. Jalan yang tidak mantap adalah jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk memperluas potensi pendanaan.

(2) Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), aplikasi pemantauan kondisi jalan, atau teknologi konstruksi terbaru dapat membantu dalam merencanakan, membangun, dan memelihara jalan dengan lebih efisien.

(3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi jalan serta pelaksanaan proyek konstruksi sangat penting.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Kerusakan jalan sebagai akibat dari bencana alam;

(2) Kondisi geografi Trenggalek yang berbukit dan berbukit dapat menyulitkan dalam pembangunan dan perawatan jalan. Beberapa daerah di Trenggalek memiliki medan yang berat, sehingga memerlukan teknik konstruksi yang lebih kompleks dan biaya lebih tinggi untuk pembangunan jalan yang mantap;

(3) Peningkatan volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas di jalan kabupaten yang tidak diimbangi dengan perawatan dan peningkatan kualitas jalan dapat mempercepat kerusakan jalan;

(4) Banyak kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melewati jalan kabupaten sehingga mengakibatkan kerusakan jalan lebih cepat dari umur konstruksi seharusnya.

Upaya/Strategi yang akan dilakukan di Tahun Mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini:

(1) Melaksanakan peningkatan jalan dengan konstruksi rigid beton untuk meningkatan kemampuan kapasitas jalan dan umur konstruksi;

(2) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memelihara jalan dalam kondisi mantap;

(3) Koordinasi dengan instansi terkait mengenai permasalahan kendaraan ODOL *(Over Dimension Over Loading);*

(4) Mengajukan opsi pendanaan infrastruktur ke Pemerintah Provinsi dan Pusat;

(5) Melaksanakan pembangunan drainase jalan dan mengoptimalkan saluran drainase yang ada.

III.2.5.2. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.5.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	99,24	99,67%	99,78%	99,89%	97,89%	100,00%	99,24%	99,24%	99,35%	99,57%	99,46%	0	1,00%	99,56%	99,56%	99,67%	101,60%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk memperluas potensi pendanaan;

(2) Pendekatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan izin sosial juga diperlukan agar pembangunan jembatan tidak terkendala masalah sosial;

(3) Mengingat Trenggalek berada di daerah rawan bencana alam, terutama banjir atau tanah longsor, maka desain dan konstruksi jembatan harus mempertimbangkan faktor ketahanan terhadap bencana alam.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Bencana alam ini bisa merusak infrastruktur yang sudah dibangun atau menghambat kelancaran pembangunan jembatan;

(2) Jika ada ketidaksetujuan dari masyarakat terkait lokasi jembatan atau pembebasan lahan, proses perizinan bisa terhambat;

(3) Banyak kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melewati jembatan kabupaten sehingga mengakibatkan kerusakan jembatan lebih cepat dari umur konstruksi seharusnya.

Upaya/Strategi yang akan dilakukan di Tahun Mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini:

(1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa setempat;

(2) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk memelihara jembatan dalam kondisi baik;

(3) Koordinasi dengan instansi terkait mengenai permasalahan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading);

(4) Mengajukan opsi pendanaan infrastruktur ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.

III.2.5.3. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.5.3. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung	22%	22%	25%	25,00%	30%	33,00%	0	22%	25%	27,00%	30,14%		0%	100%	100%	109,30%	100,47%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Desain Infrastruktur yang Tepat**:** Desain jalan dan jembatan yang sesuai dengan karakteristik daerah, seperti medan yang sulit atau rawan bencana, akan membantu memastikan akses antarkecamatan dapat terjaga dalam kondisi yang baik dan berkelanjutan;

(2) Ketersediaan dan Pengelolaan Anggaran yang Efisien;

(3) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, melalui forum musyawarah atau konsultasi publik, dapat memperlancar pelaksanaan proyek.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Trenggalek memiliki wilayah yang berbukit dan pegunungan, yang membuat pembangunan jalan dan jembatan menjadi lebih rumit dan mahal;

(2) Beberapa kecamatan di Trenggalek mungkin tidak memiliki infrastruktur transportasi yang memadai untuk mendukung mobilisasi material dan tenaga kerja ke lokasi proyek;

(3) Wilayah Kabupaten Trenggalek sebagian besar merupakan daerah rawan bencana tanah gerak sehingga sering terjadi longsor yang merusak infrstruktur jalan dan jembatan;

(4) Terkadang, masyarakat di sekitar area proyek tidak sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur. Penolakan tersebut dapat timbul karena alasan sosial, budaya, atau ketidakpuasan terhadap dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan lingkungan atau pengaruh negatif terhadap mata pencaharian masyarakat.

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa setempat;
2. Mengoptimalkan anggaran tersedia untuk memelihara jalan dalam kondisi mantab dan memelihara jembatan dalam kondisi baik;
3. Mengajukan opsi pendanaan infrastruktur ke pemerintah provinsi dan pusat.

III.2.6.1. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan pengadaan tanah dan santunan ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PSN dan PSD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.6.1. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)

Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN (Proyek Strategis Nasional), PSD (Proyek Strategis Daerah) dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	51%	78%	94%	94%	100,00%	100,00%	0	79%	82%	82%	81,82%	0	0%	101%	87%	87,04%	81,82%

Terdapat ketidaksesuaian satuan indikator kinerja dengan target dan realisasi kinerja ini disebabkan karena formula indikator kinerja tersebut adalah luas tanah yg dibebaskan pada pengadaan tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya dibagi proyeksi keseluruhan luas tanah yang dibebaskan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya dibebaskan.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lainnya ini penting agar seluruh proses pembebasan tanah berjalan lancar dan tanpa hambatan;

(2) Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari proyek yang melibatkan pembebasan tanah sangat penting. Jika masyarakat memahami dampak positif proyek tersebut, mereka akan lebih cenderung mendukungnya;

(3) Ketersediaan dana yang cukup untuk membayar ganti rugi tanah menjadi faktor penunjang yang sangat penting dalam pembebasan tanah.

Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang diperlukan untuk proyek-proyek pengadaan tanah cukup tersedia dan teralokasi dengan baik.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Proses pembebasan lahan sering kali terkendala oleh prosedur administratif yang rumit dan memakan waktu, seperti verifikasi status lahan, pencatatan hak kepemilikan, serta kesulitan dalam menentukan harga yang adil untuk ganti rugi. Hal ini memperlambat realisasi proyek;

(2) Pengukuran dan pemetaan tanah yang akurat memerlukan waktu, terutama jika terdapat sengketa atau ketidakjelasan status tanah. Kesalahan administrasi atau ketidaklengkapan dokumen kepemilikan dapat memperpanjang proses pembebasan;

(3) Beberapa warga atau kelompok masyarakat di sekitar lokasi proyek mungkin menentang pembebasan lahan karena khawatir dengan dampak sosial atau ekonomi yang ditimbulkan, seperti kehilangan mata pencaharian atau perubahan pola hidup;

(4) Di beberapa daerah, kenaikan harga tanah yang signifikan akibat adanya informasi tentang proyek besar atau nilai pasar yang berubah da Tanah yang belum memiliki sertifikat atau dokumen legalitas yang sah sering kali menemui kendala dalam pembebasan, karena pihak yang mengklaim kepemilikan mungkin tidak dapat membuktikan hak mereka secara sah;

(5) pat mempersulit proses pembebasan. Hal ini meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh lahan yang diperlukan.

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 **:**

1. Berkoordinasi dengan Pemerintaha Pusat dan Pemerintahan Provinsi terkait bantuan Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah
2. Melaksanakan Tahapan persiapan pengadaan tanah di awal

III.2.6.2. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas layanan penangananpermasalahan pengadaan tanah dan santunan ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PSN dan PSD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.6.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka

						Menengah)						**Menengah)**						**Menengah)**
Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN (Proyek Strategis Nasional), PSD (Proyek Strategis Daerah) dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	0%	0%	33%	67%	100,00%	100,00%	0	0%	50%	117%	116,67%		0%	0%	150%	175%	116,67%

Terdapat ketidaksesuaian satuan indikator kinerja dengan target dan realisasi kinerja ini disebabkan karena formula indikator kinerja tersebut adalah jumlah bidang tanah yg diberi santunan tanah bagi pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya dibagi keseluruhan Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya X 100%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Komunikasi yang efektif dengan pemilik tanah menjadi faktor utama. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kemajuan daerah dan negara;

(2) Keberhasilan pencapaian sasaran sangat bergantung pada akurasi data tentang kepemilikan, batasan, dan status hukum tanah yang akan

digunakan;

(3) Ketersediaan dana yang cukup dan pencairan yang tepat waktu untuk pembayaran santunan tanah

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Banyak kasus di mana tanah yang akan digunakan untuk pembangunan memiliki status hukum yang tidak jelas atau sengketa status kepemilikan antara individu, kelompok, atau lembaga;

(2) Pemilik tanah mungkin tidak setuju dengan nilai santunan yang ditawarkan atau merasa bahwa mereka diberi kompensasi yang tidak sesuai dengan nilai tanah mereka;

(3) Beberapa proyek infrastruktur mungkin terhambat karena tidak adanya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan akses atau jaringan utilitas.

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 **:**

(1) Konsultasi Publik terkait rencana Pengadaan Tanah harus disampaikan secara jelas dan transparan;

(2) Memastikan calon penerima ganti rugi sesuai atas nama pemegang hak.

III.2.6.3. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas layanan penangananpermasalahan pengadaan tanah dan santunan ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PSN dan PSD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.6.3. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)

Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN (Proyek Strategis Nasional), PSD (Proyek Strategis Daerah) dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya,	25%	50%	75%	100 %	100,00%	100, 00%	0	67%	83%	117 %	116,67%	0	0%	133 %	111 %	116, 67%	116,67%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Pemberian Ganti Rugi yang Wajar dan Memadai;

(2) Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk memetakan tanah dan menentukan batas wilayah yang terkena dampak pengadaan dapat mempercepat dan mempermudah proses administrasi serta pembayaran ganti rugi;

(3) Alokasi Anggaran yang Memadai.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Tanah yang memiliki status kepemilikan yang tidak jelas atau tumpang tindih antara beberapa pihak dapat menyebabkan penundaan dalam proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi.

(2) Ketidakpahaman atau perbedaan interpretasi tentang hukum pertanahan di antara pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat memperlambat penyelesaian. Proses hukum yang rumit dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian ganti rugi.

(3) Tidak tercapainya kesepakatan antara pihak pemerintah dan pemilik tanah mengenai harga ganti rugi bisa memperlambat atau bahkan menghentikan proses pembebasan tanah.

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 **:**

(1) Tahapan pengadaan tanah mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;

(2) Membentuk tim pengadaan tanah satgas A dan satgas B dengan melibatkan instansi terkait.

III.2.7.1. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya jaringan irigasi, bangunan perkuatan tebing dalam kondisi baik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.7.1. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	55%	55,73%	56,46%	57,29%	58,13%	58,97%	55%	55,85%	56,18%	58%	58,32%	0	99,95%	100,21%	99,51%	101,21%	100,32%

dalam kondisi baik																		

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Penggunaan material yang baik, dapat meningkatkan kualitas perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi;

(2) Keterlibatan Masyarakat dan Petani, Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran irigasi, tidak membuang sampah sembarangan, serta pelaporan jika terjadi kerusakan sangat penting untuk menjaga kualitas saluran irigasi;

(3) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang berkualitas akan membantu menjaga keberlangsungan saluran irigasi dalam jangka panjang.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Kurangnya kesadaran petani/P3A dalam ikut menjaga kondisi jaringan irigasi;

(2) Kurangnya tenaga untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;

(3) Banyaknya kondisi jaringan irigasi yang rusak dan belum dilakukan perbaikan.

Upaya/Strategi yang akan dilakukan di Tahun Mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini:

(1) Mendorong petani/P3A untuk berpartisipasi melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

(2) Menambah tenaga untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;

(3) Mengusulkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak ke Pemkab (DAU), Pemprov (BK) dan Pemerintah Pusat (Inpres 02).

III.2.7.2. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya jaringan irigasi, bangunan perkuatan tebing dalam kondisi baik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.7.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	31%	32,12%	33,25%	33,254%	35,84%	37,13%	31%	31,00%	32,19%	33%	35,91%	0	100,00%	96,51%	96,82%	96,78%	100,22%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Penggunaan teknologi tepat dalam desain, konstruksi, dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir, seperti penggunaan material tahan lama, analisis geoteknik yang canggih, dapat meningkatkan efektivitas infrastruktur tersebut;

(2) Pemilihan penentuan prioritas penanganan tebing sungai yang tepat dalam pengendalian banjir;

(3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir antara Pemerintah dan masyarakat.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Banyaknya infrastruktur sungai yang rusak atau tidak memadai yang belum dilakukan rehabilitasi/perbaikan;

(2) Perubahan desain pada saat pelaksanaan karena faktor kerusakan yang semakin bertambah;

(3) Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem atau bencana alam seperti banjir besar, tanah longsor bisa merusak atau mengurangi efektivitas bangunan pengendali banjir;

(4) Kewenangan dalam pengelolaan wilayah sungai.

Upaya/Strategi yang akan dilakukan di Tahun Mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini:

(1) Mengusulkan kegiatan rehabilitasi talud/tebing sungai yang rusak ke Pemkab (DAU) dan Pemerintah Pusat (BBWS Brantas);

(2) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian wilayah sungai.

III.2.8.1. Sasaran Strategis 8 : Pemenuhan pelayanan air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.8.1. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	87,83%	90,87%	93,91%	88,68%	100,00%	100,00%	0	87,36%	88,61%	90%	89,80%		0%	96%	94%	100,97%	89,80%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Tersedianya sumber mata air yang berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;

(2) Peran serta masyarakat dalam menjalankan KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum).

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Keterbatasan sumber mata air pada daerah yang mengalami kekeringan;

(2) Faktor geografis, seperti lokasi daerah yang sulit dijangkau, juga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi air;

(3) Dampak perubahan iklim, seperti musim kemarau panjang atau banjir, dapat memengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber air. Bencana alam seperti tanah longsor dan banjir juga dapat merusak infrastruktur penyediaan air minum dan menghambat akses;

(4) Kurangnya SDM untuk mengampu program pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 :

(1) Mengusulkan kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ke Pemkab (DAU) dan Pemerintah Pusat (BPPW);

(2) Pembinaan dan penambahan SDM untuk pengelolaan Sistem Air Minum;

(3) Konservasi di Sumber Air.

III.2.8.2. Sasaran Strategis 8 : Pemenuhan pelayanan air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.8.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	96,84%	97,89%	98,95%	100 %	100,00%	100,00%	0	100,00%	100,00%	100 %	100,00%	0	0%	102 %	101 %	100 %	100,00%

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Terdapat alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan SPAM;

(2) Masyarakat mendukung dan ikut menjaga fasilitas SPAM;

(3) Dukungan APBD/APBN melalui program air minum;

(4) Tidak adanya pencemaran lingkungan di sekitar sumber air;

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Kualitas air baku buruk (keruh, tercemar);

(2) Teknologi pengolahan air tidak sesuai dengan kondisi desa;

(3) Topografi desa berbukit sehingga distribusi air sulit;

(4) Daerah sering terdampak bencana (banjir, tanah longsor);

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026 :

(1) Mengusulkan kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ke Pemkab (DAU) dan Pemerintah Pusat (BPPW);

(2) Konservasi di Sumber Air.

III.2.9.1. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Sertifikat Laak Fungsi (SLF), penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.9.1. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	8%	27%	49%	53,50%	100,00%	100,00%	0	27%	53%	66%	98,77%	0	0%	100%	108%	123,62%	98,77%

gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau																		

Yang dimaksud PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah merupakan dokumen yang digunakan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah setelah bangunan gedung telah selesai dibangun dan telah dianggap layak untuk digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Proses administrasi yang jelas, transparan, dan efisien akan mendukung percepatan pengeluaran dokumen PBG dan SLF;

(2) Penerapan Teknologi Informasi yang Mendukung: Dengan adanya sistem manajemen berbasis teknologi, pengelolaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan terstruktur;

(3) Program penyuluhan dan edukasi kepada pengembang dan masyarakat mengenai pentingnya PBG dan SLF, serta tata cara pengajuannya, akan memudahkan mereka untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Kurangnya alat operasional yang mendukung kegiatan;

(2) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan dan alur permohonan PBG

(3) Kurangnya pengkaji teknis yang memiliki sertifikat keahlian di kabupaten Trenggalek.

Upaya/Strategi untuk Tahun 2026:

(1) Pelayanan yang terintegrasi dengan perizinan dasar yang lainnya.

III.2.9.2. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Sertifikat Laak Fungsi (SLF), penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.9.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusu	Regulasi bangunan gedung yang disusun	0%	25%	50%	75%	100,00%	100,00%	0	25%	50%	75%	100,00%	0	0%	100%	100%	100%	100,00%

nan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau																		

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Tersedianya Data yang akurat mengenai perkembangan pembangunan Gedung di Kabupaten Trenggalek.

(2) Melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pembangunan gedung negara di kabupaten Trenggalek

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengawasan regulasi bangunan gedung;

(2) Kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku.

Upaya / Strategi untuk Tahun 2026 :

(1) Koordinasi yang intens dengan Lembaga/Instansi Pusat dan Provinsi supaya mendapatkan update peraturan yang terbaru.

III.2.9.3. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Sertifikat Laak Fungsi (SLF), penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.9.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung,	Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	0%	1,75 %	2,81 %	3,86 %	4,91%	5,96 %	0	1,05 %	3,16 %	4,21 %	4,56%	0	0%	60,00%	112,50 %	109,09%	92,86%

Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau																		

Yang dimaksud dengan Gedung menerapkan Prinsip Hijau adalah bangunan yang dalam proses perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaannya memprioritaskan efesiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan dan kesehatan penggunanya. Seperti penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, pemanfaatan cahaya alami dan hemat energi.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Perencanaan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akan tercapai bangunan gedung yang menerapkan prinsip hijau;

(2) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap kondisi bangunan gedung negara;

(3) Berkoordinasi dengan daerah lain yang sudah menerapkan bangunan gedung dengan prinsip hijau.

Faktor pengahambat capaian realisasi sasaran adalah:

(1) Anggaran yang tidak sesuai yang direncanakan awal mengakibatkan prinsip gedung hijau terabaikan;

(2) Belum tersedianya pengeloa teknis bangunan gedung negara yang memiliki sertifikasi.

Upaya / Strategi untuk Tahun 2026 :

(1) Mendorong perencanaan pembangunan/rehabilitasi gedung negara untuk menerapkan prinsip gedung hijau.

III.2.10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.10. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	20%	40%	76%	80%	100,00 %	100, 00%	0	67%	106 %	126 %	156,00 %	0	0%	168 %	140 %	157, 35%	155,69 %

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Adanya lembaga pelatihan yang berkualitas dan memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan pelatihan terampil dalam bidang konstruksi akan sangat mendukung keberhasilan program

(2) Penyuluhan dan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya pelatihan tenaga terampil konstruksi sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pengusaha.

(3) Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah sangat krusial dalam mensukseskan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

(4) Kerjasama dengan balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kementerian Pekerjaan Umum

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Kurangnya minat dari calon peserta pelatihan.

(2) Kurangnya Infrastruktur Pelatihan yang Memadai

(3) Kurangnya data yang akurat dan sistematis mengenai tenaga kerja konstruksi dan badan usaha konstruksi yang ada di Trenggalek menjadi hambatan dalam perencanaan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.

(4) Kurangnya SDM yang mengampu tugas pengembangan jasa konstruksi

Upaya/Strategi yang akan dilakukan di Tahun Mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini:

(1) Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi;

(2) Kerjasama dengan balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kementerian Pekerjaan Umum;

(3) Meminta Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan data tenaga kerja konstruksi dan badan usaha konstruksi yang lebih akurat;

(4) Menambah formasi pegawai di bidang Jasa Konstruksi.

III.2.11. Sasaran Strategis 11 : Pemenuhan pelayanan air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.11. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Sasaran Jangka Menengah)
Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah	65,41	65,92	66,43	83,10%	67,48%	67,98%	0	82,6%	83,05%	83,54%	85,00%	0	0	0,012530 3	0,0125011	100,53%	125,74%

	Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak																	

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Tersedianya infrastruktur yang memadai, seperti sistem sanitasi yang efisien (misalnya, instalasi pengolahan air limbah atau septic tank yang ramah lingkungan);

(2) Dilaksanakannya sosialisasi yang baik memberikan pemahaman kepada rumah tangga mengenai cara-cara pengolahan limbah yang tepat dan manfaatnya bagi kesehatan dan lingkungan ;

(3) Teknologi pengolahan air limbah yang sederhana dan efektif, yang dapat diterapkan oleh masyarakat;

(4) Tersedianya tenaga pendamping dalam pelaksanaan program sanitasi.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

(1) Belum optimalnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Masyarakat;

(2) Kurangnya infrastruktur pengolahan air limbah yang memadai di beberapa wilayah Trenggalek. Di daerah terpencil atau pedesaan, sistem sanitasi yang layak dan efisien mungkin masih terbatas;

(3) Belum tersedianya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Trenggalek.

Upaya/Strategi yang akan dilakukan di Tahun Mendatang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini:

(1) Melaksanakan sosialisasi yang baik memberikan pemahaman kepada rumah tangga mengenai cara-cara pengolahan limbah yang tepat dan manfaatnya bagi kesehatan dan lingkungan;

(2) Mencari teknologi pengolahan air limbah yang sederhana dan efektif, yang dapat diterapkan oleh masyarakat;

(3) Melaksanakan koordinasi dan asistensi dengan lembaga/kementerian terkait.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian dengan Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kota Lain	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)
1.	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	66,89%	80,00% (sumber : Madiun.com)	83,61%
		Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	99,46%	70,00% (Sumber : times malang.com Merpakan capain 2024)	142,08%
2.	Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	58,32%	59,83% (Sumber :Jawa Pos, Radar Malang)	97,47%

Kesimpulan Tabel Perbandingan Capaian dengan Kota Lain:

1. Kondisi Jalan Kabupaten
   - Capaian Tahun 2025 sebesar 66,89%, masih lebih rendah dibandingkan kota lain (Madiun) yang mencapai 80%.
   - Jika dibandingkan kota lain, tingkat capaian kabupaten berada pada 83,61% dari capaian kota pembanding.
   - Kesimpulan: Kondisi jalan kabupaten masih perlu ditingkatkan agar setara atau melampaui daerah pembanding.
2. Fungsi Jembatan di Jalan Kabupaten
   - Capaian kabupaten sangat tinggi yaitu 99,46%%, jauh lebih baik dibandingkan kota lain (70%).
   - Persentase capaian terhadap kota lain mencapai 142,08%.
   - Kesimpulan: Kinerja pemeliharaan dan fungsi jembatan di kabupaten sudah sangat baik, bahkan lebih unggul dari daerah pembanding.
3. Kualitas Saluran Irigasi
   - Capaian kabupaten mencapai 58,32%, lebih rendah dibandingkan kota lain (59,83%).

- Persentase capaian terhadap kota lain sebesar 97,47%
- Kesimpulan: Kualitas saluran irigasi di kabupaten Trenggalek lebih rendah dibandingkan kota pembanding, menunjukkan belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi

Secara Keseluruhan :

Kabupaten Trenggalek unggul dalam capaian fungsi jembatan dan kualitas saluran irigasi, namun, kondisi jalan kabupaten Trenggalek masih tertinggal dari kota pemban .ding dan perlu mendapat perhatian lebih.

Tabel 3.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nili) SAKIP	98,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi,	100,00 %	Menunjang
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	108,16 %		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00 %	Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	Menunjang
	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	62,50%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen RRTR yang disusun	62,50%	Dalam penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang terkendala belum terbitnya Persetujuan Substansi dari

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
							pusat (Kementerian)
	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	50,00%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun	50,00%	Tidak adanya agenda penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan
	Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	69,96%	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE;	Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria	100%	Menunjang
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH;	Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec)	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG;	Jumlah lokasi Pendataan Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle HakJumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	100%	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH;	Persentase Pengurusuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk PSN dan PSD	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN;	Persentase Kegiatan Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah dan PembangunanPersentase Penyelesaian Permasalahan Sengketan Tanah Garapan pada Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan	100%	Menunjang
	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	95,56%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemantapan Jalan kabupaten	82,58%	1. Kondisi geografi Trenggalek yang berbukit dapat menyulitkan dalam pembangunan dan perawatan jalan. Beberapa daerah di Trenggalek memiliki medan yang berat, sehingga memerlukan teknik konstruksi yang lebih kompleks dan biaya lebih tinggi untuk pembangunan jalan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
							yang mantap 2.Kerusakan jalan akibat bencana alam
		Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	101,60 %		Persentase jembatan berfungsi baik	99,45%	Menunjang
		Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung	100,47 %				
	Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	81,82%	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	luas Tanah yang terbebaskan untuk Pembangunan	100%	Menunjang
		Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	116,67 %		Persentase fasilitasi Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah	100%	Menunjang
		Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya,	116,67 %				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
	Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	100,32 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	100,32 %	Menunjang
		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	100,22 %		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banji	100,19 %	Menunjang
	Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	89,80%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	89,80%	Menunjang
		Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	100,00 %				
	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	98,77%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	97,21 %	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
	hijau						
		Regulasi bangunan gedung yang disusun	100,00 %				
		Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	92,86%				
	Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	155,69 %	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100%	Menunjang
	Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak	125,74 %	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	100,01 %	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan	100%	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
				SISTEM AIR LIMBAH	Pengolahan Air Limbah Domestik		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	97,68%	Menunjang

III.3. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

"Pada Sub Bab Capaian Kinerja Lainnya, akan disajikan capaian kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Renstra periode 2021-2026. Penyajian capaian tujuan Perangat Daerah pada laporan tahun terakhir periode Renstra adalah untuk menyampaikan informasi kinerja selama 5 (lima) tahun sebagaimana arahan dari Kementerian PANRB selaku Instansi Pembina. "

Tujuan 1	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	N/A	81,00	N/A	N/A

Nilai Reformasi Birokrasi adalah nilai untuk mengetahuai sejauh mana perangkat daerah mengukur terhadap capaian reformasi birokrasi untuk menuju tata kelola yang efektif dan efisien.

Untuk indikator Nilai Reformasi tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran karena adanya perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat dari Kementrian Pengayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomer B/01/RB.06/2023 tanggak 18 Januari 2023 hal perubahan reformasi birokrasi sehingga tidak terdapat pengukuran capaian tahun 2025.

Tujuan 2	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur di Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi, Bidang Drainase	Dokumen Perencanaan Berkelanjutan	N/A	93,00 %	47,49%	51,06 %
	Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap serta Jembatan di		78,00 %	74,12%	95,02 %

Tujuan 2	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Persampahan Air Limbah dan Pengembangan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum dan Bidang Pertanahan	Jalan Kabupaten yang Berfungsi Baik				
	Presentase Pengadaan Tanah dan Penataan Aset bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya		100,00 %	105,05%	105,05%
	Presentase Kualitas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Presentase Bangunan Perkuatan Tebing Dalam Kondisi Baik		65,00 %	64,75%	99,61 %
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berkelanjutan		68,00 %	97,21 %	142,95 %
	Presentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100,00%	155,69%	155,69 %
	Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum		100,00%	89,80%	89,80 %

1. Indikator: Dokumen Perencanaan Berkelanjutan

Berkelanjutan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif, terarah, dan berwawasan jangka panjang untuk mendukung peningkatan kualitas layanan infrastruktur. Penyusunan

dokumen ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, seperti penataan ruang, tata bangunan, konstruksi jalan, drainase, persampahan, air limbah, permukiman, sumber daya air, penyediaan air minum, dan pertanahan. Reaalisasi tahun 2025 sebesar 47,49% dari target 93%, sehingga tingkat keberhasilan indikator ini mencapai 51,06%, yang menunjukkan bahwa sebagian komponen perencanaan telah tersusun, namun masih diperlukan peningkatan dalam kelengkapan, integrasi, dan implementasi dokumen perencanaan agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Serta Jembatan yang Berfungsi Baik

Indikator Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap serta Jembatan di Jalan Kabupaten yang Berfungsi Baik mengukur kualitas dan kinerja infrastruktur transportasi darat di wilayah kabupaten. Indikator ini menunjukkan seberapa besar ruas jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi baik sehingga aman serta layak untuk digunakan masyarakat. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 74, 12% dari target 78%, dengan tingkat capaian 95,02%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan, peningkatan jalan, dan rehabilitasi jembatan telah ber jalan efektif, sehingga sebagian besar jaringan jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap. Infrastruktur yang baik ini turut mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

3. Presentase Pengadaan Tanah dan Penataan Aset bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN, PSP, dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan dan menata aset yang diperlukan untuk proyek pembangunan, termasuk proyek strategis nasional (PSN), proyek strategis daerah (PSD), serta infrastruktur umum lainnya. Pada tahun 2025, realisasi sebesar 105,05% dari target 100% menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah dan penataan aset dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor, kelancaran proses administrasi, serta dukungan masyarakat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan prioritas daerah.

4. Presentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik dan Presentase Bangunan Perkuatan Tebing dalam Kondisi Baik

Indikator ini menilai kondisi jaringan irigasi serta bangunan perkuatan tebing yang berfungsi menjaga stabilitas lahan dan mendukung kegiatan pertanian. Realisasi tahun 2025 mencapai 64,75% dari target 65%, dengan tingkat capaian 99,61%. Artinya, sebagian besar jaringan irigasi dan bangunan pengaman tebing telah berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah

daerah dalam melakukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan.

5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berkelanjutan

Indikator ini mengukur kualitas penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi prinsip keberlanjutan, seperti efısiensi energi, keselamatan bangunan, kenyamanan pengguna, serta pemenuhan standar teknis bangunan hijau. Pada tahun 2025, realisasi sebesar 97,21% dari target 68%, atau capaian 142,95%, menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bangunan berkelanjutan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek pengawasan teknis, penerapan regulasi bangunan hijau, dan kapasitas pelaksana konstruksi.

6. Presentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Indikator ini mengukur efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan jasa konstruksi, termasuk kepatuhan pelaksana terhadap standar mutu, keselamatan konstruksi, serta regulasi teknis lainnya. Capaian tahun 2025 sebesar 155, 69% dari target 100% menunjukkan bahwa pengawasan jasa konstruksi telah dilakukan secara sangat optimal dan melebihi target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan penguatan sistem pengendalian, peningkatan kualitas evaluasi lapangan, serta komitmen untuk memastikan pelaksanaan konstruksi aman dan berkualitas.

7. Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum

Indikator ini menggambarkan proporsi rumah tangga yang telah memperoleh akses air minum layak, baik melalui jaringan perpipaan maupun sumber air layak lainnya. Pada tahun 2025, capaian menunjukkan 89,80%. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat rumah tangga di wilayah sasaran belum mendapatkan akses air minum, sehingga target belum tercapai sepenuhnya.

Kinerja Lain Terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembagunan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek telah mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai kegiatan strategis Tahun 2025, khususnya pada kegiatan yang telah ditagging Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Adapun aktivitas yang kilakukan adalah :

1. Tujuan Pembangunan Gedung Responsif Gender Mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke layanan publik, mewujudkan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan serta menjamin keamanan dan kenyamanan (terutama dari kekerasan berbasis gender) di lingkungan perkantoran

pemerintah. Pelaksanaan Pembangunan gedung negara menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak

2. Pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender mengintegrasikan kebutuhan laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjamin akses, kontrol, dan manfaat yang setara atas infrastruktur jalan dan jembatan , seperti penyediaan jalur yang aman, pencahayaan, dan aksesibilitas ramah disabilitas. Sesuai kewenangan Dinas PUPR pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan adalah Jalan dan Jembatan ruas kabupaten

III.4. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang tahun 2025 adalah sebesar Rp. 104.706.603.395,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 94.217.670.421,47 atau sebesar 89,98%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Rp**	**16.276.953.057,55**	**Rp**	**14.807.442.066,00**	**90,97%**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	29.999.391,40	Rp	27.265.000,00	90,88%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	13.280.750.249,00	Rp	11.959.650.990,00	90,05%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	78.252.863,00	Rp	76.479.750,00	97,73%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	51.734.459,40	Rp	45.823.000,00	88,57%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	541.380.907,55	Rp	491.303.664,00	90,75%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	136.724.089,00	Rp	125.673.200,00	91,91%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.777.585.472,20	Rp	1.700.731.973,00	95,67%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	380.525.626,00	Rp	376.120.579,00	98,84%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Rp**	**6.745.291.244,00**	**Rp**	**6.637.282.820,00**	**98,40%**
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.741.493.242,00	Rp	2.716.590.420,00	99,09%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.003.798.002,00	Rp	3.920.172.200,00	97,91%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Rp**	**2.717.313.515,15**	**Rp**	**2.702.794.750,00**	**96,47%**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.717.313.515,15	Rp	2.702.794.750,00	99,46%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	**Rp**	**2.768.411.272,00**	**Rp**	**2.731.754.453,00**	**98,68%**

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PERSAMPAHAN REGIONAL			
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.768.411.272,00	Rp 2.731.754.453,00	98,67%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Rp 7.568.764.912,00**	**Rp 7.474.33.203,00**	**98,75%**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.568.764.912,00	Rp 7.445.347.603,00	98,36%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Rp 3.231.427.836,00**	**Rp 3.193.611.009,00**	**98,83%**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.231.427.836,00	Rp 3.193.611.009,00	98,82%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rp 4.033.572.855,40**	**Rp 2.836.011.465,47**	**70,31%**
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 4.033.572.855,40	Rp 2.836.011.465,47	70,31%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Rp 104.622.775,00**	**Rp 0,00**	**0,00%**
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 104.622.775,00	Rp 0,00	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Rp 57.965.671.513,00**	**Rp 55.942.040.597,00**	**96,51%**
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 57.965.671.513,00	Rp 52.133.023.582,00	89,93%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rp 250.000.000,00**	**Rp 173.812.632,00**	**69,53%**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 150.000.000,00	Rp 117.233.644,00	78,15%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00	Rp 12.397.000,00	61,98%
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 80.000.000,00	Rp 44.181.988,00	55,22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Rp 755.657.802,90**	**Rp 450.258.347,00**	**59,58%**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci	Rp 542.627.961,00	Rp 266.504.677,00	49,11%

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 150.526.295,00	Rp 133.385.170,00	88,61%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 62.503.546,00	Rp 50.368.500,00	80,58%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Rp 186.769.353,00**	**Rp 150.797.385,00**	**80,74%**
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 186.769.353,00	Rp 150.797.385,00	80,73%
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Rp 662.703.899,00**	**Rp 286.747.200,00**	**43,27%**
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 662.703.899,00	Rp 286.747.000,00	43,26%
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**Rp 308.003.640,00**	**Rp 222.183.200,00**	**72,14%**
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 308.003.640,00	Rp 222.348.200,00	72,19%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Rp 326.125.730,00**	**Rp 284.274.000,00**	**87,17%**
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Rp 143.059.730,00	Rp 135.552.000,00	94,75%
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Rp 183.066.000,00	Rp 148.722.000,00	81,23%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**Rp 763.888.990,00**	**Rp 327.312.851,00**	**42,85%**
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Rp 763.888.990,00	Rp 327.312.851,00	42,84%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Rp 41.425.000,00**	**Rp 13.579.000,00**	**32,78%**
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 41.425.000,00	Rp 13.579.000,00	32,77%
TOTAL	**Rp 104.706.603.395,00**	**Rp 98.234.201.778,47**	**93,82%**

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP	A (88,00)	A (86,24)	98,00%	16.276.953.057,55	14.807.442.066,00	90,97%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,5	98,97	108,16%			
2	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	100,00%	62,50%	62,50%	755.657.802,90	450.258.347,00	59,58%
3	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	20,00%	10,00%	50%	104.622.775,00	0,00	0,00%
4	Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	100,00%	69,96%	69,96%	2.102.147.259,00	1.134.261.051,00	53,96%
5	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	70,00%	66,89%	95,56%	57.965.671.513,00	55.942.040.597,00	96,51%
		Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	97,89%	99,46%	101,60%			
		Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung	30,00%	30,14%	100,47%			

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100,00%	81,82%	81,82%	662.703.899,00	286.747.000,00	43,26%
		Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100,00%	116,67%	116,67%			
		Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya,	100,00%	116,67%	116,67%			
7	Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	58,13%	58,32%	100,32%	6.745.291.244,00	6.636.762.620,00	98,39%
		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	35,84%	35,91%	100,22%			
8	Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air	100,00%	89,80%	89,80%	2.717.313.515,15	2.702.794.750,00	96,46%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Minum						
		Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	100,00%	100,00%	100,00%			
9	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	100,00%	98,77%	98,77%	4.033.572.855,40	2.836.011.465,47	70,31%
		Regulasi bangunan gedung yang disusun	100,00%	100,00%	100,00%			
		Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	4,91%	4,56%	92,86%			
10	Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	100%	156,00%	155,69%	250.000.000,00	173.812.632,00	69,52%
11	Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari	67,48%	85,00%	125,74%	7.568.764.912,00	7.445.347.603,00	98,36%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Dasar menjadi Layak						

Tabel 3. 7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

NO	Sasaran	Indikator Kinerja				ANGGARAN			
		Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP	A (88,00)	A (86,24)	98,00%	16.276.953.057,55	14.807.442.066,00	90,97%	1,141
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,50	98,97	108,16%				
2	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	100,00 %	62,50%	62,50%	755.657.802,90	450.258.347,00	59,58%	1,049
3	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	20,00%	10,00%	50%	104.622.775,00	0,00	0,00%	0,00
4	Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	100,00 %	69,96%	69,96%	2.102.147.259,00	1.134.261.051,00	55,64%	1,257

NO	Sasaran	Indikator Kinerja				ANGGARAN			
		Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Reforma Agraria yang disusun								
5	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang)	70,00%	66,89%	95,56%	57.965.671.513,00	52.133.023.582,00	89,93%	1,103
		Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik	97,89%	99,46%	101,60%				
		Prosentase akses antarkecamatan yg terhubung	30,00%	30,14%	100,47%				
6	Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100,00 %	81,82%	81,82%	662.703.899,00	286.747.000,00	43,26%	2,428
		Jumlah Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya	100,00 %	116,67 %	116,67%				
		Jumlah Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya,	100,00 %	116,67 %	116,67%				

NO	Sasaran	Indikator Kinerja				ANGGARAN			
		Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
7	Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	58,13%	58,32%	100,32%	6.745.291.244,00	6.636.762.620,00	98,39%	1,019
		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	35,84%	35,91%	100,22%				
8	Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum	100,00 %	89,80%	89,80%	2.717.313.515,15	2.702.794.750,00	96,46%	0,983
		Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	100,00 %	100,00 %	100,00%				
9	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, Meningkatnya penyelenggaraan	Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	100,00 %	98,77%	98,77%	4.033.572.855,40	2.836.011.465,47	70,31%	1,382
		Regulasi bangunan gedung yang disusun	100,00 %	100,00 %	100,00%				
		Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	4,91%	4,56%	92,86%				

NO	Sasaran	Indikator Kinerja				ANGGARAN			
		Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau								
10	Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	100%	156,00 %	155,69%	250.000.000,00	173.812.632,00	69,52%	2,239
11	Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak	67,48	85,00%	125,74%	7.568.764.912,00	7.445.347.603,00	98,36%	1,278

KETERANGAN

Cara menghitung tingkat efisiensi :

12. Jika sasaran memiliki 1 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{presentase\ capaian\ indikator}{presentase\ realisasi\ anggaran}$$

13. Jika sasaran memmiliki indikator lebih dari 1

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{rata - rata\ presentase\ capaian\ indikator}{presentase\ realisasi\ anggaran}$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :
a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
b. Jika = 1 maka impas
c. Jika > 1 maka efisien

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Berjalan, terdapat beberapa sasaran belum dapat mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut tentu menjadi perhatian dan penentuan strategi kedepan untuk pencapaian sasaran kinerja Tahun yang akan datang, antara lain :

- Mengupayakan tetap tercukupinya SDM serta meningkatkan kualitasnya;
- Koordinasi yang lebih intensif dan efektif dengan stakeholder terkait (baik lingkup Pemda maupun Pihak Swasta);
- Pelaksanaan tender diupayakan diawal tahun anggaran, sehingga waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan semakin panjang dan tidak terkendala pada musim penghujan.
- Melakukan dan meningkatkan pengawasan selama pelaksanaan pembangunan.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. **Perencanaan yang Lebih Matang dan Akurat**

- Pemetaan Kebutuhan dan Prioritas**:** Dinas PUPR perlu melakukan pemetaan yang lebih detail mengenai wilayah yang masih kekurangan akses air minum. Menyusun prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, kepadatan penduduk, dan ketersediaan sumber air akan membantu mempercepat proses distribusi.
- **Perencanaan Infrastruktur yang Berkelanjutan**: Selain memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, perencanaan untuk pengembangan sistem perpipaan dan instalasi pengolahan air (IPAM) yang lebih efisien dan tahan lama harus menjadi fokus utama.

2. Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

- **Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat**: Dinas PUPR harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi terkait lainnya (seperti PDAM) untuk memastikan pencapaian sasaran bersama.
- **Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**: Kerjasama dengan pihak swasta dan LSM yang berfokus pada penyediaan air bersih dapat mempercepat pembangunan infrastruktur air minum di daerah yang sulit dijangkau.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**: Menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk aparat teknis Dinas PUPR agar dapat mengelola dan

memelihara infrastruktur air minum dengan lebih baik. Peningkatan kapasitas teknis akan membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem air.

- **Peningkatan Kapasitas Pengelola PDAM**: Penguatan kapasitas pengelola PDAM agar mampu mengelola air minum dengan efisien dan menjaga kualitas air tetap terjaga.

4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

- **Inovasi dalam Teknologi Air**: Dinas PUPR perlu mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi pengolahan air dengan biaya rendah dan penerapan sistem pengolahan air ramah lingkungan untuk daerah terpencil.
- **Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi**: Pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk monitoring dan evaluasi distribusi air minum, yang akan mempermudah pengawasan dan deteksi masalah secara real-time.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- **Sosialisasi dan Edukasi**: Dinas PUPR perlu meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan sistem air bersih di tingkat masyarakat, serta pentingnya menggunakan air dengan bijak.
- **Mendorong Inisiatif Desa atau Kelurahan**: Memberikan kewenangan dan dorongan kepada desa atau kelurahan untuk mengelola dan memelihara sistem air minum di tingkat lokal dengan cara pemberian pelatihan dan bantuan modal.

6. Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Ketat

- **Peningkatan Sistem Monitoring**: Menyusun sistem pemantauan capaian dan masalah yang lebih terstruktur. Melakukan audit kinerja secara berkala agar evaluasi dapat dilakukan dengan tepat waktu.
- **Indikator Kinerja yang Jelas**: Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam LKJIP untuk melihat sejauh mana realisasi akses air minum tercapai. Dengan indikator yang jelas, pengukuran kinerja akan lebih terarah.

7. Pemanfaatan Anggaran yang Efektif

- **Optimalisasi Anggaran**: Mengalokasikan anggaran dengan lebih efektif dan efisien untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur air minum. Melakukan perencanaan anggaran yang transparan dan memastikan anggaran tersebut sampai pada proyek yang tepat.
- **Diversifikasi Sumber Pendanaan**: Mencari sumber pendanaan alternatif selain dari APBD, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau kerjasama dengan pihak swasta.

8. Kolaborasi Antar Instansi

- **Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan**: Mengintegrasikan program penyediaan air bersih dengan program kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya air minum yang aman.
- **Penguatan Sinergi Antar Instansi**: Membentuk tim yang melibatkan Dinas PUPR, PDAM, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk mengkoordinasikan upaya peningkatan akses air minum dengan lebih terarah.

9. Perbaikan dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur

- **Pemeliharaan Rutin**: Fokus pada perawatan dan pemeliharaan jaringan air minum yang sudah ada untuk mencegah kerusakan sistem yang dapat mengganggu distribusi air. Penjadwalan pemeliharaan rutin yang lebih baik bisa membantu dalam menghindari gangguan sistem.

Melalui upaya-upaya perbaikan ini, Dinas PUPR Trenggalek dapat memperbaiki kinerja dalam penyediaan akses air minum bagi rumah tangga. LKJIP yang lebih terstruktur dan berbasis pada data yang akurat dapat menjadi alat untuk mengevaluasi pencapaian sasaran dan mendorong keberhasilan jangka panjang dalam penyediaan air bersih.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025. .

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Supriyadi No.2 A ☎ (0355) 791326

TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANJANG PURWOKO, ST., M.Ars**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TRENGGALEK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 01 September 2025

BUPATI TRENGGALEK Selaku Pihak Kedua,	Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TRENGGALEK Selaku Pihak Pertama,
MOCHAMAD NUR ARIFIN	**ANJANG PURWOKO, ST., M.Ars** Penata Tingkat I NIP. 19800926 200501 1 005

PERUBAHAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	- Nilai (kategori nilai) SAKIP - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,00 (A) 91,50
2	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	- Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	100,00 %
3	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan kota hijau yang disusun	Dokumen Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	20,00 %
4	Meningkatnya Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	- Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah dan Reforma Agraria yang disusun	100 %
5	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	- Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantab (baik dan sedang) - Persentase jembatan di Jalan kabupaten yang berfungsi baik - Persentase akses antar kecamatan yg terhubung	70,00 % 97,89 % 30,00 %
6	Meningkatnya kualitas layanan penanganan permasalahan Pengadaan Tanah dan Santunan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN dan PSD	- Presentase Luas Tanah yang dibebaskan pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya - Presentase Bidang Tanah yang diberi Santunan Tanah bagi Pembangunan pada PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur lainnya - Presentase Penanganan Permasalahan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk PSN, PSD dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya,	100,00 % 100,00 % 100,00 %
7	Meningkatnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	- Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik - Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	58,13 % 35,84 %
8	Pemenuhan pelayanan Air Minum	- Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum - Persentase Desa Pengelola SPAM dengan Baik	100 % 100 %
9	Pemenuhan Pelayanan Air Limbah	- Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar menjadi Layak	67,48 %
10	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	- Rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan dan/atau diproses	100,00 %
11	Penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung,	- Regulasi bangunan gedung yang disusun	100,00 %
12	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	- Bangunan gedung negara yang menerapkan prinsip hijau	4,91 %
13	Meningkatnya kompetensi, layanan informasi dan pembinaan jasa kontruksi	- Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	100,00 %

Program (5)		Anggaran (6)		Keterangan (7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	16.276.953.057,55	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	6.305.291.244,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	2.717.313.515,15	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp	2.768.411.272,00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	7.568.764.912,00	APBD
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	3.231.427.836,00	APBD
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	4.033.572.855,40	APBD
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	104.622.775,00	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	56.450.671.513,00	APBD
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	250.000.000,00	APBD
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	755.657.802,90	APBD
12	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp	186.769.353,00	APBD
13	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	662.703.899,00	APBD
14	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp	308.003.640,00	APBD
15	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Rp	326.125.730,00	APBD
16	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Rp	763.888.990,00	APBD
17	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp	41.425.000,00	APBD

Trenggalek, 01 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
Selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUROCHMAN

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TRENGGALEK
Selaku
Pihak Pertama,

ANJANG PURWOKO, ST., M.Ars
Penata Tingkat I
NIP. 19800926 200501 1 005